PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna Memenuhi Syarat Mengajukan Skripsi Strata Satu Sosiologi

Disusun oleh :

MOCHAMMAD RINDHO NUGROHO

(11720008)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mochammad Rindho Nugroho
NIM	: 11720008
Jurusan	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, supaya dapat diketahui oleh anggota dosen penguji.

Yogyakarta, 8 Januari 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
4B119ADF908813119
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mochammad Rindho Nugroho
NIM. 11720008

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochammad Rindho Nugroho
NIM : 11720008
Jurusan : Sosiologi
Judul : ***Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman***

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi.

Harapan saya semoga saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Januari 2016

Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata, M.A.
NIP. 19711207 200901 1003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/41/2016

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMMAD RINDHO NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 11720008
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Januari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.
NIP. 19711207 200901 1 003

Penguji I

Sulistyaningsih, S.Sos M.Si.
NIP. 19761224 200604 2 001

Penguji II

Drs. Musa, M.Si
NIP. 19620912 199203 1 001

Yogyakarta, 21 Januari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
DEKAN

Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

"Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil."

(Tan Malaka – *Massa Aksi*, 1926)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Bapak dan Ibuk,

Untuk saudara-saudaraku, kakak dan adikku

Untuk keluargaku

Untuk sahabatku

Untuk ikatan dan pergerakanku

Untuk almamaterku,

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk hidup dan kehidupan.

Semoga bermanfaat!

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa semua tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Achmad Zainal Arifin, S.Ag., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus guru saya. Terima kasih atas inspirasi, bimbingan, arahan, koreksi, saran dan kritik hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Staf dan karyawan TU Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yag telah membantu kelacaran administrasi dalam penyelesaian skripsi.
7. Pemerintah Desa Caturtunggal yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di desa Caturtunggal.
8. Bapak Kusmono selaku Kepala Bagian Pembangunan Desa Caturtunggal. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan membantu proses penelitian ini.
9. Bapak Sugiman sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Caturtunggal. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan.
10. Kepada seluruh Narasumber, bapak Sulistyo Eko Narmono (Kepala dukuh Nologaten), bapak Sudarman (Kepala dukuh Karangmalang), bapak Marda (Kepala dukuh Seturan), bapak Heri Sugiarto (Kepala dukuh Janti), bapak Samsudin (Kepala dukuh Ambarukmo). Terimakasih atas waktu, kerjasama dan informasi yang disampaikan. Semoga dapat membawa masyarakat desa Caturtunggal menjadi lebih baik.
11. Sahabat, kawan, dan teman-teman Sosiologi angkatan 2011 yang tidak dapat disebut satu per satu. Terimakasih telah mengajari banyak hal selama 4 tahun ini.

12. Teman-teman BEM PS Sosiologi periode 2013-2014 yang telah banyak memberikan ilmu dalam berorganisasi.
13. Immawan dan Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik di tingkat Pimpinan Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Koordinator Komsariat UIN Sunan Kalijaga dan Pimpinan Cabang Kabupaten Sleman. Ikatan ini telah memberikan ruang untuk membentuk karakter diri dan sumbangan lain yang tak terkira pada diri saya hingga saat ini. Jayalah ikatanku, abadi perjuanganmu! Fastabiqul khoirot!
14. Rekan kerja di Motio.net Mbak Widy, Mbak Hilda, Mas Dio, Mbak Erna, Mas Ilham, Ichus, Muha, Ade, Yogi, Mas Nur, dan lainnya yang belum sempat disebutkan. Terimakasih atas bantuan, fasilitas, informasi dan lain-lainya yang sangat membantu terciptanya karya ini.
15. Teman-teman sekaligus keluarga pertama yang saya temukan di Yogyakarta Ahmad, Amin, Eko, Irfan, Miftah, Fajri, Lilik, Zulfa, Maratus Sholeha. Semoga silaturahmi dan persahabatan kita terus terjaga sampai tua nanti.
16. Teman-teman alumni SMA Muhammadiyah Kudus regional Yogyakarta Husin, Artha, Fahmi, Bobi dan lain-lain yang terus memberikan semangat agar skripsi ini segera selesai.
17. Arifiartiningsih, teman, sahabat, kekasih yang terus memberikan semangat, inpirasi dan nasehat baik bagi penyelesaian karya ini dan juga hidup saya di masa kini dan masa depan.

18. Teman-teman KKN angkatan 83 Kang Qohar, Rohim, Agung, Ima, Mbak Retno, Rizka dan Novita. Semoga pengabdian kalian kepada masyarakat Gedongkiwo dicatat sebagai amal ibadah.
19. Sahabatku Ilham Dzikri dan Malikul, semoga lekas menyusul menjadi sarjana.
20. Sekolah Politik Kerakyatan KIBAR (Komunitas Indonesia Baru) yang telah membuka mata saya akan wajah politik Indonesia dari sudut yang berbeda.
21. Kepada guru-guru saya selama ini. Baik guru di SD Muhammadiyah 1 Kudus, SMP 3 Kudus maupun SMA Muhammadiyah Kudus. Guru tidak hanya mengajar dan mendidik kita tapi mereka membentuk karakter serta membekali hidup kita dengan ilmu selamanya. Terimakasih guruku, anakmu sudah sampai sini.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal'alamin.

Yogyakarta, 8 Januari 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

SURAT PERNYATAAN ..... **i**

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang……. 1

B. Rumusan Masalah…… 9

C. Tujuan dan Manfaat……. 10

D. Tinjauan Pustaka…….. 11

E. Kerangka Teori…… 16

F. Metodologi Penelitian……19

G. Sistematika Penelitian……. 32

BAB II GAMBARAN UMUM

DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN..... 33

A. Kondisi Geografis Dan Orbitrasi…….. 33

B. Kondisi Demografis…….. 36

C. Kondisi Sejarah, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Politik…… 38

1. Sejarah desa caturtunggal…… 38
2. Kondisi ekonomi……. 39
3. Kondisi sosial-budaya……. 41
4. Kondisi tata pemerintahan……..44

D. Profil Pedukuhan…….. 46

1. Pedukuhan Nologaten……. 47
2. Pedukuhan seturan…….. 49
3. Pedukuhan karangmalang…….. 51
4. Pedukuhan Ambarukmo……. 54
5. Pedukuhan Janti……. 58

BAB III MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA CATURTUNGGAL 64

A. Pengertian musrenbang desa…… 64

B. Payung hukum musrenbang desa…….. 66

C. Sejarah musyawarah pembangunan desa……. 69

D. Proses musrenbang desa di caturtunggal……71

1. Musrenbang dukuh…… 71

2. Musrenbang desa…… 75

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CATURTUNGGAL 79

A. Musrenbang sebagai medan pertarungan…… 85

B. Musrenbang sebagai tindakan komunikatif…… 88

C. Analisis umum…… 91

BAB V PENUTUP 94

A. Rangkuman …… 94

B. Kesimpulan……. 96

C. Saran…… 98

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN 104

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani
Ha	: Hekatare (satuan luas)
JANKIS	: Janti King Square (komunitas)
Ka. Bag	: Kepala Bagian
KB	: Keluarga Berencana
KK LKMD	: Kelompok Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
KK	: Kepala Keluarga
KWT	: Kelompok Wanita Tani
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LPMD	: Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Mdpl	: Meter diatas Permukaan Laut (satuan tinggi suatu tempat/wilayah)
Musren	: Musyawarah Perencanaan
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
P2KP	: Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
P3A	: Pemberdayaan Petani Pemakai Air
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PAZIS	: Pengelola Amil Zakat Infaq Shodaqoh
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKL	: Pedagang Kaki Lima

PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Polsek	: Kepolisian Sektor
Posyandu	: Pos Layanan Terpadu
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rt	: Rukun Tetangga
Rw	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
TK	: Taman Kanak-kanak
TPK	: Tim Pemberantas Kemiskinan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 37

Tabel 2. Mutasi Penduduk di desa caturtunggal dalam waktu satu tahun 38

Tabel 3. Struktur ekonomi masyarakat berdasar matapencaharian..... 40

Tabel 4. Gambaran Umum Dukuh Nologaten, Seturan, Karangmalang, Ambarukmo dan Janti 61

ABSTRAK

Pasca disahkan, Undang-Undang Desa memberi dampak yang begitu besar bagi keberadaan desa. Desa yang selama ini menjadi entitas yang tersubordinan dalam sistem pemerintahan, kini justru sedang didorong untuk mempercepat laju pembangunannya. Salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan adalah dengan melaksanakan perencanaan yang tepat. Proses perencanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Contoh dari desa yang memiliki laju pertumbuhan yang pesat adalah Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman. Desa Caturtunggal telah melaksanakan Musrenbang sejak medio tahun 2000, jauh sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Berangkat dari hal tersebut peneliti mencoba mengkaji fenomena Musrenbang di Desa Caturtunggal. penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal, partisipasi masyarakat dalam musrenbang, dan pengaruh partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi perumusan dan pembuatan kebijakan di desa Caturtunggal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali lebih jauh persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal. Persepsi tersebut didasarkan pada pengalaman masyarakat dalam mengikuti Musrenbang. Proses penggalian data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Fenomena musrenbang di desa Caturtunggal dianalisis menggunakan dua teori yakni teori medan dan teori tindakan komunikatif. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, melakukan verifikasi, dilanjutkan dengan analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musrenbang di Desa Caturtunggal tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan membuat konsensus. Disisi lain, Musrenbang menjadi arena pertarungan antara aktor yang memiliki kepentingan dan yang memiliki sumberdaya. Partisipasi masyarakat secara umum hanya terjadi di level akar rumput. Pada level desa, partisipasi masyarakat diwakili oleh perwakilan mereka dari dukuh maupun Rt/Rw.

Kata kunci : *musrenbang, musyawarah, pembangunan, partisipasi, caturtunggal, teori medan, teori tindakan komunikatif*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan sosial-politik di masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari stuktur politik masyarakat, kedudukan desa sudah ada sejak jaman kerajaan Majapahit pada kisaran tahun 1350 M. hal ini ditunjukkan dengan keberadaan prasastri Himad-Walandit.[1] 15 tahun kemudian, Mpu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama juga memberikan konsepsinya mengenai hubungan desa dan negara yang dikenal dengan nama lain *Desawanana.*[2] Pada perkembangannya, kedudukan politik desa terus berkembang mulai dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu kala, peran desa bagi bangsa dan negara Indonesia sangatlah besar.

Proses perkembangan desa dalam konteks politik tidak berjalan alami sebagaimana proses perkembangan desa menjadi kota dalam konteks ekonomi. Sebagai bagian yang menjadi subordinan - bagian terendah dalam "kasta" sistem pemerintahan, desa seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil. Pada masa penjajahan Belanda, desa mendapat hak otonomi dengan diterbitkannya IGO dan IGOB. Selain itu, pemerintah

[1] Bayu Surianingrat, *Pemerintahan administrasi desa dan kelurahan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) hal. 14-18

[2] Daddi H. Gunawan, dkk, *Jalan Baru Otonomi Desa*, (Jakarta : Kemitraan, 2013) hal. 14

kolonial Balanda juga memberikan hak otonom untuk memilih kepala desanya melalui RR. Namun, semua kebijakan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penjajah belanda pada kala itu.[3] Demikian pula pada masa pendudukan jepang. Pada masa pendudukan jepang, sistem pemerintahan Indonesia dibuat sangat sentralistis dengan pemerintahan militer jepang. Akhirnya desa hanya dijadikan alat untuk memenangkan perang pasifik bagi pemerintah militer jepang.[4]

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, upaya untuk melakukan desentralisasi dan otonomi pada desa mulai dilakukan. Upaya tersebut diawali dengan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1945 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa otonomi terbawah ada di tingkat desa, dan berdasar hukum, desa berhak dan berwewenang mengatur rumah tangganya sendiri. Karena tidak berjalan efektif, undang-undang tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1948 dan diganti dengan UU No. 22 tahun 1948. Dalam undang-undang ini desa dijadikan sebagai daerah tingkat III yang memiliki otonomi sendiri yang diatur dalam undang-undang. Upaya untuk melaksanakan desentralisasi desa dan otonomi desa terus disempurnakan pada masa orde lama. Penyempurnaan desentralisasi dan otonomi desa dilakukan dengan merevisi undang-undang sebelumnya yaitu dengan ditebitkannya UU No. 1 tahun 1957 dan UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja.

---

[3] *Ibid*,. hal 15
[4] *Ibid*,.

Upaya desentralisasi dan otonomi desa dinilai berhenti ketika pemerintah orde baru meresmikan UU No. 5 tahun 1974. Undang-undang tersebut menyeragamkan bentuk kesatuan hukum yang berada dibawah pemerintah daerah tingkat II menjadi Desa. Selain menghilangkan bentuk masyarakat hukum lokal 'selain' desa, undang-undang tersebut juga dianggap telah menghilangkan aspek otonomi dalam tubuh Pemerintah Desa. Dalam konteks undang-undang tersebut, desa hanya menjadi bagian terkecil dari pemerintahan supra desa (kecamatan) dan hanya menjadi kepajangan tangan dari pemerintah daerah diatasnya.

Proses desentralisasi dan otonomi desa kemudian dimulai kembali ketika negara Indonesia memulai babak baru yakni reformasi. Lahirnya reformasi memberi sumbangan terhadap perubahan paradigma dalam politik dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Angin perubahan bernama desentralisasi dan otonomi daerah tersebut pun berhembus hingga ke desa. Muara dari proses desentralisasi dan otonomi desa adalah dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Lahirnya undang-undang desa merupakan puncak dari proses desentralisasi dan otonomi yang sudah dirumuskan sejak awal reformasi. Lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 dinilai belum cukup memberi dampak yang signifikan kepada desa. Adanya undang-undang desa diharapkan mampu menghidupkan kembali pembangunan dan iklim demokrasi di tingkat desa sebagai bagian terkecil dalam pemerintahan.

Keberadaan undang-undang desa memberi ekspektasi lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Salah satunya faktornya adalah keberadaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada desa sebesar kurang lebih Rp 1 Milyar. Adanya dana yang sedemikian besar tentu menjadi daya tarik sendiri bagi Pemerintah Desa karena Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini berasal dari dana perimbangan pemerintah daerah jumlahnya tidak sebesar yang diharapkan.

Bagi masyarakat desa, keberadaan undang-undang desa juga memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi atau pelibatan masyarakat secara langsung diharapkan mampu menambah akselerasi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Pelibatan masyarakat dimanifestasikan dalam bentuk Musrenbang Desa. Musrenbang Desa merupakan sebuah forum musyawarah yang mempertemukan *stakeholder* untuk merumuskan agenda pembangunan di tingkat desa. Landasan hukum dalam pelaksanaan Musrenbang Desa mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam undang-undang SPPN (UU No. 25 tahun 2004). Selain SPPN, dikeluarkannya Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang perencanaan Desa juga menjadi landasan pelaksanaan musrenbang khususnya di tingkat desa.[5] Dengan kata lain, upaya partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan sudah

[5] Rianingsih Djohani, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*, (tidak ada kota terbit: Asia Foundation, 2008) hlm. 4

dilakukan sebelum adanya undang-undang desa.

Sejarah panjang mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan juga dialami oleh Desa Caturtunggal. Desa Caturtunggal sudah menjalani proses perencanaan pembangunan sejak tahun 2000.[6] Setidaknya ada dua faktor yang mendorong pelaksanaan Musrenbang Desa. Pertama, hal ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Desa guna menciptakan pemerintahan yang transparan.[7] Kedua, adanya program pemerintah seperti P2KP dan PNPM yang berbentuk pemberdayaan masyarakat yang mendorong masyarakat sebagai komunitas untuk mengadakan musyawarah guna menyusun program berdasar prioritas.[8] Dengan kata lain, apa yang sekarang dikenal sebagai msurenbang desa di Caturtunggal merupakan kombinasi antara intervensi Pemerintah Desa dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.[9]

Desa Caturtunggal merupakan desa yang sangat besar dan luas. Kompleksitas yang dialami tidak hanya pada tatanan masyarakatnya tetapi juga pada tatanan pemerintahannya.[10] Sebagai sebuah organisasi birokrasi modern, pembagian tugas di Desa Caturtunggal ditata dengan sedemikian rupa. Secara organisatoris, sistem pemerintahan di Desa Caturtunggal terbagi atas pemerintah formal dan informal. Secara sederhana pemerintah formal dikenal dengan Pemerintah Desa beserta perangkat desa. Sementara

[6] Wawancara dengan kepala dukuh Karangmalang
[7] Berdasar wawancara dengan Ka. Bag Pembangunan
[8] Berdasar wawancara dengan kepala dukuh Karangmalang
[9] Baca Mempertemukan Dua Hulu, IRE
[10] Pernyataan ini didasarkan pada hasil observasi pada tanggal

pemerintah informal yang dimaksud merupakan pemerintah wilayah seperti dukuh dan jajarannya.[11]

Proses perencanaan pembangunan di Desa Caturtunggal berjalan dinamis. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang melatar belakangi. Pertama, wilayah Caturtunggal sangatlah luas dan meliputi 20 pedukuhan. Kedua, dengan jumlah penduduk hingga ratusan ribu jiwa, maka sangat tidak efektif untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam satu tempat disaat bersamaan, ketiga, ditinjau dari pendekatan sejarah dan sosial, masyarakat Desa Caturtunggal sangat majemuk dan memiliki permasalahan dan cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Untuk menghadapi ketiga tantangan diatas maka dibentuklah sebuah forum musrenbang dusun sebagai rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Desa Caturtunggal.

Selain musrenbang dukuh, di Desa Caturtunggal juga dilakukan Musren RT/RW. Musren RT/RW dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat akar rumput. Aspirasi dari masyarakat yang telah diperoleh nantinya akan dibawa ke musrenbang dukuh untuk disusun menjadi prioritas program. Prioritas program yang nantinya disepakati diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik berkaitan dengan program infrastruktur, sementara program non-fisik meliputi program-program pemberdayaan atau yang berkaitan

[11] Data mengenai tata pemerintahan Desa Caturtunggal dapat dilihat dalam data monografi Desa Caturtunggal tahun 2013

dengan pembangunan masyarakat.[12]

Tidak hanya prioritas program saja, musrenbang dukuh juga dilaksanakan untuk menyepakati masalah anggaran program pembangunan. anggaran program pembangunan yang dimaksud meliputi alokasi dana pembangunan, sumber dana pembangunan dan estimasi jumlah bantuan yang diperoleh baik dari proposal maupun swadaya masyarakat. setelah semua prioritas program dan anggaran program disepakati maka didokumentasikan dalam bentuk proposal pembangunan.[13]

Dokumen proposal pembangunan yang telah disepakati di musrenbang dusun selanjutnya dibawa ke dalam Musrenbang Desa untuk disepakati bersama.[14] Peserta Musrenbang Desa merupakan perwakilan dari dukuh dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang akan bermusyawarah, bersama desa dan LPMD untuk menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa merupakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun, sementara RKP merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam rentang waktu satu tahun.[15]

---

[12] Hasil wawancara dengan kepala dukuh Karangmalang
[13] Ibid.,
[14] Pendapat ini didasarkan pada hasil wawancara dengan seluruh informan
[15] Hasil wawancara dengan Ka. Bag Pembangunan

Aspirasi mayarakat yang telah masuk nantinya akan melalui proses verifikasi dimana nantinya tidak semua usulan dari dukuh dapat direalisasikan oleh pemerintah Desa Caturtunggal. Fenomena musyawarah Musrenbang Desa dapat dianalisa melalui berbagai sudut pandang.[16] Dinamika yang terjadi meliputi pertarungan kepentingan dalam mencapai sebuah konsensus. Teori medan (*Theory of field*) memberi gambaran bagaimana pertarungan kepentingan dapat terjadi dalam musrenbang. Musrenbang menjadi "*dimension of struggle*" dari aktor yang memiliki kepentingan dan memiliki penguasaan sumberdaya. Sementara itu, ketika aktor-aktor yang ada dalam musrenbang sudah mengalami eliminasi dan "menyisakan" kelas sosial yang sama, maka kesepakatan bersama dapat dicapai melalui tindakan komunikatif. Substansi dari pelaksanaan musrenbang adalah bagaimana menyusun kesepakatan bersama (konsensus) dalam konteks kegiatan pembangunan di Desa Caturtunggal. Proses penyusunan konsensus yang komunikatif ini dapat ditinjau melalui teori tindakan komunikatif.

Untuk mencapai kesepahaman, maka sebuah aspirasi harus dapat diuji oleh orang lain yang menerima informasi tentang aspirasi tersebut. Musrenbang merupakan wahana yang tepat untuk menguji aspirasi tersebut. Agar sebuah aspirasi dapat diterima sebagai kesepakatan bersama, setidaknya harus melalui 3 tahapan yaitu benar (objektif), tepat (normatif) dan jujur (subjektif). Ketiga tahapan tersebut, menurut tindakan

[16] Ibid.,

komunikatif, harus disepakati secara serentak agar dapat diterima oleh publik. Proses untuk menuju kesepahaman inilah yang dimaknai sebagai tindakan komunikatif.

Penelitian ini akan menyampaikan bagaimana alur proses musrenbang di Desa Caturtunggal dan dianalisis melalui dua pendekatan yang telah disebut diawal; teori medan dan teori tindakan komunikatif. Bagaimana proses musrenbang, keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang dan pengaruh dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan desa dijelaskan dalam penelitian ini. Walaupun demikian, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna meskipun secara prosedur telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menjawab persoalan diatas maka diperlukan pertanyaan yang tepat. Oleh karena itu penulis merumuskannya sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Caturtunggal?

b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang-desa?

c. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan perumusan kebijakan di Desa Caturtunggal?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Berasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Di Desa Caturtunggal bertujuan sebagai berikut :

a. untuk mengetahui pemahaman masyarakat Caturtunggal mengenai partisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang Desa

b. untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Caturtunggal

c. untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan perumusan kebijakan Pemerintah Desa Caturtunggal

d. siapa saja yang berpengaruh dalam perumusan dan pembuaan kebijakan di Desa Caturtunggal

adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini mencakup manfaat secara akademis dan manfaat praksis. Manfaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian ilmu sosial dan politik. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan

sosiologi pada umumnya dan sosiologi politik secara lebih spesifik.

b. Manfaat praktis (kebijakan)

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberi kontribusi terhadap kajian kebijakan pada ranah desa pada umumnya dan Desa Caturtunggal khususnya sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi desa untuk memberi gambaran dalam melakukan penyusunan kebijakan. Selanjutnya analisis yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini mampu memberi *problem solving* bagi persoalan partisipasi dan proses pembangunan di desa, terkhusus di Desa Caturtunggal.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang baik adalah penelitian yang otentik. Penelitian yang otentik adalah penelitian yang memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada, maka dilakukan komparasi atau perbandingan. Aspek yang diperbandingkan antara lain mengenai: objek penelitian, metode penelitian, teori yang digunakan dan tujuan penelitian.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian ini. Antara lain: *pertama*, “Partisipasi

Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya".[17] Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran yang rinci bagaimana partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fikri Azhar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kelurahan Pegirian kurang baik.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kelurahan Pegiriran dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian diskriptif kulaitatif. Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Pegirian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Fikri Azhar menggunakan teori dan indikator partisipasi yang menjadi acuan penelitian tersebut. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagai pisau analisa yaitu teori tangga partisipasi oleh Arstein dan teori level partisipasi oleh Wilcox.

Kedua, penelitian dengan judul "Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon".[18] Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Dewi

[17] Fikri Azhar, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, jurnal kebijakan dan manajemen public Universitas Airlangga volume 3 nomor 2 mei-agstus 2015 hal. 63-70.

[18] Suwandi dan Dewi Rostyaningsih, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di*

Rostyaningsih tersebut dilakukan di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses perencanaan pembangunan partisipatif serta mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Jenis penelitian yang dilakukan Suwandi dan Dewi merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Surakarta belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut karena terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan yaitu tahapan persiapan yakni musyawarah pra musrenbang dan tahapan pembahasan kegiatan prioritas yang akan dsampaikan ke tingkat musrenbang kecamatan. Adapun faktor yang mempengaruhi perencanaan partisipatif di Desa Surakarta tidak berjala dengan baik sebagian besar didominasi oleh pemahaman yang minim adri masyarakat dan Pemerintah Desa tentang perencanaan pembangunan.

Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tahun tidak ditemukan

Ketiga, penelitian yang dikaji oleh Sri Ekawati berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan".[19] Penelitian ini merupakan studi deskriptif kulaitatif tentang partisipasi di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Penelitian ini menjadi menarik karena menjadikan kelompok perempuan sebagai objek dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 9 (Sembilan) informan. Untuk validitas data menggunakan observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku, internet, jurnal internasional dan monografi kelurahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan untuk mengkaji masalah partisipasi perempuan dalam musrenbang menggunakan analisa gender model Havard. Analisa gender model Havard menempatkan partisipasi perempuan dikaji berdasarkan profil aktivitas, control, akses dan manfaatnya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi perempuan dalam musrenbang tahun 2010 sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk partisipasi perempuan dalam musrenbang. Bentuk partisipasi tersebut antara lain adalah dengan caramenghadiri musrenbang, terlibat dalam susunan kepanitiaan, menjadi

[19] Sri Ekawati, *Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Deskriptif Kulaitatif Tentang Partisipasi Di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta),* (Universitas Sebelas Maret Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2010)

perwakilan Rw, PKK, dan Posyandu, menympaikan usul dalam siding pleno dan siding komisi serta menjadi wakil kelurahan di Musrebang Kecamatan.

Secara teoritis, penelitian ini mendukung analisa gender yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perempuan dalam musrenbang kelurahan cukup aktif dengan keterwakilan mencapai 37%. Akses yang diperoleh perempuan dalam musrenbang ditunjukkan dalam bentuk keterlibatan dalam siding komisi. Sementara untuk kontrol masih kurang dimiliki oleh perempuan. Adapun manfaat yang diperoleh antara lain menambah pengalaman bagi perempuan.

Keempat,"Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencaan Pembangunan Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang"[20] yang ditulis oleh Joseph Motte. Penelititan tersebut dilakukan untuk mencari variable yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan pada tingkat apa partisipasi masyarakat yang ada di kecamatan Gajahmungkur kota Semarang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Motte menggunakan metode kombinasi melalui pendekatan deskriptif eksploratif untuk menganalisis data kualitatif dan pendekatan korelasi untuk menguji data kuantitatif dengan menggunakan analisis tabulasi silang.

Selain itu untuk membedah fenomena yang terjadi, Motte

[20] Joseph Motte, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*, (Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang: thesis tidak diterbitkan, 2005)

menggunkan teori Arnstein. Arnstein mengklasifikasi partisipasi masyarakat ke dalam 8 tingkatan partisipasi, yaitu : *Manipulation*, *Therapy*, *Informing*, *Consultation*, *Placation*, *Partnership*, *Delegate Power*, *Citizen Control*. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa partisipasi masyarakat di kecamatan Gajahmungkur masuk dalam kategori sedang. Tingkat partisipasi masyarakat yang sedang tersebut dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan, dan pegalaman berorganisasi.

E. KERANGKA TEORI

Kajian sosiologi politik mengenai musyawarah mengarah pada pendekatan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dihadapkan dengan demokrasi partisipatif dalam memposisikan partisipasi masyarakat. secara konsep, demokrasi deliberatif dan demokrasi partisipasi sangat jauh berbeda. Jika demokrasi partisipasi menkankan pada prosedur *bagaimana caranya* agar masyarakat dapat turut serta dalam pengambilan keputusan, demokrasi deliberatif justru melihat *dengan cara apakah* agar opini "mayoritas" dapat mempengaruhi sebuah keputusan.[21] Terdapat 2 pendekatan sosial yang dapat membentuk demokrasi deliberatif dalam kajian ilmu sosial/sosiologi. Pertama, Teori Medan (*Theory Of Field*) yang dikemukakan oleh Bourdieu. Kedua, Teori Tindakan Komunikatif yang diusung oleh Jurgen Habermas.

[21] Pendapat ini didasarkan pada beberapa literature antaralain "demokrasi deliberatif" karya Budi Hardiman dan "Demokrasi Lokal" yang disusun oleh tim International IDEA.

Teori Medan (*Theory of Field)*

Bourdieu menempatkan ruang publik sebagai medan pertarungan antar aktor untuk mewujudkan kepentingan dan kemampuan dalam menguasai sumberdaya. Medan tersebut digerakkan oleh hierarki yang bertarung diantara mereka. Hierarki yang dimaksud adalah kelas.

> The field are dimension of a struggle for the realization of interest and acquisition of resources – they include, for example, the field of economic production, of intellectual life, of educational attainment, of art, and of political power. The field are organized hierarchically by the struggles within them. They interest and serve to reproduce one another. The register for the translation of hierarchies between fields is class.[22]

Dalam konteks Musrenbang Desa, yang menjadi predikat sebagai *fields* adalah forum musyawarah itu sendiri. Musyawarah menjadi arena pertarungan (*dimension of struggle*) antar aktor yang membawa kepentingan (*interest*) dan kemampuan sumberdaya (*acquisition of resources*). Pengertian kepentingan dan kemampuan sumberdaya dalam konteks ini sangatlah bersifat abstrak dan tidak dapat digeneralisasi menjadi hitam-putih. Secara definitif, kepentingan dan kemampuan dimaksud dalam pembahasan ini terbatas dalam kepentingan dan kemampuan sumberdaya untuk merealisasikan program pembangunan. Adanya kepentingan dapat mendorong aktor tersebut untuk terlibat dalam musrenbang. Namun, untuk merealisasikan kepentingnnya, seorang aktor

[22] Malcom Waters, *Modern Sociological Theory*,(: Sage Publikation,1998) hlm 200

harus berhadapan dengan aktor lain yang tidak hanya memiliki kepentingan tapi juga memiliki kemampuan sumberdaya.

Teori Tindakan Komunikatif

Habermas memiliki pandangan atau fokus pembahasan yang berbeda mengenai musyawarah dibanding Boudieu. Musyawarah, menurut Habermas, didasarkan pada tindakan rasional. Habermas meyakini bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersifat rasional.[23] Tindakan antarmanusia, lanjutnya, bersifat rasional karena tindakan itu berorientasi pada konsensus atau pencapaian kesepakatan. Tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus inilah yang disebut sebagai tindakan komunikatif.[24]

Untuk mencapai tujuannya, tindakan komunikatif perlu didukung oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatif lah yang akhirnya mengarahkan seluruh proses memaknai Bahasa, ungkapan-ungkapan non verbal dan pengambilalihan perspektif orang lain, sehingga antar aktor dapat mengerti satu sama lain. Saling mengerti adalah syarat untuk mencapai konsensus bebas kekerasan.[25] Konsensus ini dapat dianggap rasional jika para peserta dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan tersebut secara bebas dan tanpa paksaan. Masih menurut Habermas,

---

[23] Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* ,(Yogyakarta: Kanisius, 2009) hlm. 34

[24] *Ibid.*,

[25] *Ibid.*, hlm. 35

keberhasilan komunikasi tergantung pada kemampuan pendengar untuk "menerima atau menolak" klaim-klaim kesahihan. Artinya, klaim kesahihan harus serentak benar, tepat dan jujur supaya pendengar dapat mengambil sikap. Oleh sebab itu, untuk mencapai sebuah konsensus diperlukan penerimaan serentak klaim kebenaran, ketepatan dan kejujuran.[26]

Selain mengusung tindakan komunikatif sebagai "prosedur" untuk menuju sebuah kesepahaman (konsensus), Habermas juga mengajukan konsep tindakan strategis. Jika tindakan komunikatif mengarahkan pada kesepahaman, maka konsep tindakan strategis berorientasi pada keberhasilan dalam mempengaruhi.[27] Meskipun memiliki karakter yang sama dengan tindakan komunikatif, namun tindakan strategis berbeda dengan tindakan komunikatif. Tindakan strategis menggunakan Bahasa tidak sebagai medium pemahaman, melainkan alat untuk memaksakan kehendak.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologis. Penelitian fenomenologi

[26] *Ibid.*, hlm. 37-38
[27] *Ibid.*, hlm. 35

merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada pengalaman-pengalaman manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan pengalamannya. Pada hakekatnya, setiap orang akan melihat realitas yang berbeda pada waktu yang berbeda dan situasi yang berbeda.[28]

Pendekatan ini digunakan untuk memahami arti dari peristiwa dan kaitan-kaintanya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.[29] Secara lebih kongkrit, pendekatan ini digunakan untuk mencari persamaan persepsi masyarakat Caturtunggal sebagai bagian dari interpretasi atas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa persepsi narasumber sangat beragam. Meskipun demikian, diantara keberagaman persepsi tersebut ditemukan kesamaan-kesamaan yang mengarah pada pola yang sama dalam memandang pelaksanaan Musrenbang Desa.

Musrenbang Desa dimaknai sebagai forum yang diselenggarakan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk masalah pembangunan di Desa Caturtunggal. Secara kronologis, Musrenbang Desa dimulai dari musrenbang dukuh yang hasilnya kemudian dibawa menuju Musrenbang Desa. Perbedaan persepsi masyarakat terjadi di tingkat akar rumput (dukuh). Hal ini dibuktikan dengan perbedaan pola pelaksanaan, penyelenggara dan peserta musrenbang dukuh di Desa

[28] M. Syahran Jailani, "Ragam Penelitian Qualitative" dalam Jurnal Edu-Bio vol. 4 (Jambi: Institute Agama Islam Negeri Sulthan Thaha, 2013) hal. 42-43

[29] *Ibid.* Hal 43

Caturtunggal. Dari ke lima dukuh yang dijadikan narasumber, secara mendasar memiliki perbedaan dalam melaksanakan musrenbang dukuh. Meskipun demikian, semua narasumber mengaku melaksanakan musrenbang dukuh sesuai dengan arahan normative yang sama.

Perbedaan lain adalah persepsi masyarakat dalam menempatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Di tingkat dukuh atau dalam musrenbang dukuh, masing-masing dukuh menempatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalkan, di dukuh karangmalang, warga dilibatkan secara langsung dalam musren RT, sementara di dukuh lain peserta musrenbang dukuh hanya cukup diwakili oleh tokoh masyarakat (pengurus RT/RW dan KK LKMD). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat diwakilkan pada “tim pembangunan” seperti yang dilakukan oeh Dukuh Seturan.

2. Locus dan Focus

Lokasi penelitian yang telah dilakukan di Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta. Lokasi ini dipilih setelah melalui beberapa pertimbangan. *Pertama*, Desa Caturtunggal merupakan desa yang memiliki perkembangan yang pesat. Hal ini dapat kita saksikan bersama melalui pembangunan yang terjadi di wilayah Caturtunggal seperti pembangunan hotel dan kawasan

ekonomi lainnya.[30] Keberadaan pembangunan hotel, café, rumah makan dan kawasan ekonomi lainnya menujukkan bahwa Desa Caturtunggal memiliki pembangunan yang pesat dibanding kawasan lainnya. Belum lagi desa ini dikelilingi oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Setidaknya terdapat 25 perguruan tinggi yang terdiri dari 4 perguruan tinggi negeri dan sisanya merupakan perguruan tinggi swasta. Dengan pesatnya pembangunan yang terjadi maka tdak salah jika desa caturunggal dianggap sebagai kawasan ekonomi sekaligus kawasan pendidikan di kabupaten Sleman.

Kedua, selain disebut sebagai kawasan ekonomi dan kawasan pendidikan, Desa Caturtunggal juga dijuluki sebagai "Indonesia Mini" atau miniature Indonesia. Hal ini disebabkan karena dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Desa Caturtunggal sangat majemuk. Kemajemukan ini dapat dilihat dari komposisi masyarakat yang ada di Desa Caturtunggal. selain itu kemajemukan yang ada juga dipengaruhi oleh keberadaan kawasan ekonomi dan kawasan pendidikan yang ada di desa Caturutnggal. Kedua kawasan vital desa tersebut mendorong banyak orang dari berbagai penjuru negeri untuk hadir di Desa Caturtunggal. maka tidak heran jika banyak ditemukan rumah kost disekitar desa Catutunggal. Pada akhirnya kemajemukan ini memberi dampak pada dinamika sosial masyarakat Desa Caturtunggal.

Ketiga, Desa Caturtunggal secara territorial terbagi kedalam 20

[30] Hasil Observasi yang dilakukan pada bulan januari 2015

dukuh. Selain itu, Desa Caturtunggal juga memiliki wilayah yang sangat luas. Selain dari segi teritoris dan geografis, Desa Caturtunggal juga memiliki latar belakang yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Desa Caturtunggal merupakan gabungan dari 5 desa yang dilebur menjadi 1 desa besar bernama Desa Caturtunggal. latar belakang historis ini dinilai masih memiliki pengaruh terhadap dinamika sosio-politik masyarakat Desa Caturtunggal hingga saat ini. Terbaginya territorial desa menjadi 20 pedukuhan juga memberi tantangan tersendiri bagi Desa Caturtunggal dalam menghadapi dinamika yang ada dalam pelaksanaan Musrenbang Desa.

Fokus penelitian ini adalah pada partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan seberapa berpengaruh partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Desa Caturtunggal. Sebagaimana amanat UU no. 6/2014 bahwa seluruh kebijakan pembangunan desa harus didasarkan pada prakarsa masyarakat. Pemahaman dan respon masyarakat terhadap pemaknaan aspirasi akan menentukan sikap dalam mengikuti Musrenbang dan berjalannya proses pembangunan di Desa Caturtunggal. Secara lebih mendalam hal ini akan disampaikan dalam bab selanjutnya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak. Pertama, Kepala Bagian Pembangunan sebagai representasi dari Pemerintah

Desa. Kedua, kepala dukuh yang merupakan representasi dari pemimpin wilayah di dalam Desa Caturtunggal, ketiga, ketua LKMD Caturtunggal sebagai pelaksana musrenbang di Desa Caturtunggal.

Selanjutnya, objek dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal. Forum msyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) merupakan forum yang bersifat multidimensi. Keberadaan Musrenbang Desa bisa ditinjau melalui berbagai perspektif. Dalam penelitian ini Musrenbang Desa diteliti melalui pendekaan sosiologis. Partisipasi masyarakat merupakan buah dari interaksi antar masyarakat. Musyawarah adalah salah satu bentuk dari interaksi tesebut. Maka untuk membentuk sebuah kesepakatan bersama diperlukan interkasi dan partisipasi masyarakat. penelitian ini tidak mengkaji produk dari musyawarah tersebut namun lebih melihat bagaimana proses yang terjadi dalam musyawarah tersebut.

Ditinjau dari kronologinya, Musrenbang Desa tidak berdiri tunggal namun bersifat rangkaian kegiatan. Sebelum diadakan Musrenbang Desa di Kantor Desa, proses penjaringan aspirasi warga dimulai dari musren RT/RW, kemudian naik menjadi Musrenbang Dukuh, baru pada akhirnya ditutup dengan Musrenbang Desa. Musren RT/RW dan Musrenbang Dukuh dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menysusun prioritas program yang akan diajukan ke Musrenbang Desa. Musrenbang Desa dilakukan untuk menyusun RPJM dan RKP

Desa berdasar prioritas program yang telah disepakati dan melalui proses eliminasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penggunaan wawancara dalam melakukan pengumpulan data dibagi menjadi 3 model, yaitu: wawancara tidak terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara terstruktur.[31] Wawancara atau *interview* merupakan cara yang efektif untuk melakukan penggalian data, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan menjelaskan proses yang sedang berlangsung. Wawancara juga merupakan tekhnik yang lazin digunakan untuk menggali data pada penelitian kualitatif yang bersifat naratif-deskriptif.

Untuk menggali data pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Metode ini dipilih dengan alasan penulis perlu melakukan komparasi antara satu informan dengan informan yang lain agar menemukan satu kesimpulan yang dapat menjelaskan proses partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Caturtunggal. Proses wawancara dengan informan dimulai dari tanggal 5 Juli 2015 hingga 24 Agustus 2015. Adapun informan yang

[31] Program Studi Sosiologi, *Pedoman Penulisan Proposal/Skripsi Sosiologi*, (buku tidak diterbitkan) hal 22-23

telah diwawancarai terdiri dari: Kepala Bagian Pembangunan dan 5 Kepala Dukuh serta ketua LPMD Caturtunggal. Desa Caturtunggal terdiri dari 20 Dukuh. Namun, dalam penelitian ini tidak semua dukuh diwawancari. Kepala dukuh yang telah diwawancarai dipilih berdasarkan karakteristik wilayah dukuh tersebut. Dukuh yang dipilih untuk dijadikan narasumber antara lain Dukuh Nologaten, Dukuh Ambarukmo, Dukuh Seturan, Dukuh Janti, Dukuh Karangmalang. Kelima dukuh tersebut memiliki karakter yang berbeda satu sama lain sehingga dianggap mampu mewakili kemajemukan yang ada di Desa Caturtunggal. Dengan potensi dan latar belakangnya masing-masing memeri gambaran bagaimana kemajemukan yang terjadi di Desa Caturtunggal, dalam konteks ini adalah pelaksanaan Musrenbang Desa.

b. Observasi lapangan

Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari metode pengumpulan lain. Selain itu, dengan observasi dapat membantu penulis menemukan temuan awal (hipotesis) dan melakukan pemetaan dengan mencari kriteria tertentu yang dibutuhkan. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan berjarak atau pengamatan secara tidak langsung. Peneliti menempatkan diri sebagai orang luar (*outsider*) dalam mengamati fenomena yang ada dalam masyarakat Caturtunggal. bentuk pengamatan yang dilakukan antaralain mengamati kondisi fisik

pembangunan yang terjadi di Desa Caturtunggal, kondisi wilayah di masing-masing dukuh serta pengamatan di kantor Desa Caturtunggal. Hasil pengamatan yang telah dilakukan kemudian di dokumentasikan dalam bentuk catatan untuk kemudian dinarasikan dalam penelitian ini. Pelaksanaan observasi telah dilaksanakan baik sebelum maupun selama penelitian berlangsung yakni antara bulan Januari 2015 hingga September 2015.

c. Dokumentasi

penelusuran dokumen dimaksud untuk mencari tahu mengenai kebijakan, peraturan dan undang – undang yang memuat aturan, hasil, dan proses pembangunan serta partisipasi masyarakat di Desa Caturtunggal. Dokumen-dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain undang-undang yang mengatur mengenai Musrenbang Desa meliputi Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU NO. 25 Tahun 2004) dan lain sebagainya. Selanjutnya dokumen lain yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah hasil kebijakan pembangunan desa yakni dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Caturtunggal (RPJM Desa Caturtunggal) tahun 2015-2020. Selain itu terdapat pula data monografi desa tahun 2013-2014 dan data-data yang diperoleh dari badan pusat statistik seperti Kecamatan Depok dalam Angka dan Kabupaten Sleman dalam Angka.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis atau pengolahan data dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi meluputi merangkum dan memilih data pokok yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data digunakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.[32] Proses ini dilakukan selama proses penelitian dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terlebih dahulu baru kemudian diseleksi sedemikian rupa untuk menemukan benang merah penelitian. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa dalam mengumpulkan data, peneliti menemukan banyak sekali data. Semua data tersebut sama bersifat pentingnya. Namun untuk menyusun penelitian ini dan agar pembahasan tidak melebar terlalu jauh maka dibutuhkan seleksi atas data-data yang telah dihimpun sebelumnya. Data yang digunakan untuk menyusun ini antaralain data-data yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan musrenbang, proses pelaksanaan musrenbang dan dinamika musrenbang yang ada di Desa Caturtunggal. Data yang tidak terkait dengan pembahasan diatas akan dipilah atau dijadikan menjadi data sekuder yang membantu

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2011), hal 247

menjelaskan fenomena musrenbang di Desa Caturtunggal.

b. Verifikasi data

Verifikasi merupakan langkah yang dilakukan untuk menguji konsistensi data antara satu dan yang lain apakah data yang diperoleh teruji validitasnya atau tidak. Untuk mengetahui data yang diperoleh konsisten dan valid atau tidak dapat dilakukan dengan cara Triangulasi data yaitu mencocokan antara data dari satu narasumber dengann narasumber yang lain untuk mencari kesesuaiannya. Proses verifikasi data dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi hasil wawancara antara dukuh satu dengan dukuh yang lain maupun dengan Pemerintah Desa. Kemudian proses verifikasi data ini juga dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dari dokumen dengan hasil wawancara dengan narasumber. Data yang dianggap valid adalah data yang memiliki kesesuaian atau konsisten dengan data yang disampaikan oleh sumber data lain atau narasumber lain.

c. Analisis

Setelah semua data terkumpul dan teruji validitasnya maka tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah metode yang digunakan untuk membaca data yang telah terkumpul dengan menggunakan teori. Teori digunakan untuk menguji apakah hasil temuan yang sudah disampaikan diawal sesuai atau tidak dengan realitas dilapangan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk memedah fenomena

musrenbang adalah teori medan dan teori tindakan komunikatif. Kedua teori yang digunakan bukan digunakan untuk membahs dua fenomena yang berbeda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata Musyawarah tidak hanya menjadi ruang publik untuk menyampaikan gagasan tapi juga menjadi arena pertarungan antar aktor. Pada dasarnya, aktor yang terlibat dalam musrenbang memiliki kepentingan masing-masing, namun pada akhirnya hanya aktor yang memiliki sumberdaya yang dapat mengikuti musrenbang di tingkat yang lebih tinggi.

Setelah terjadi eliminasi, aktor yang mengikuti Musrenbang Desa adalah perwakilan dari dukuh-dukuh yang ada di bawah Desa Caturtunggal. dengan demikian, peserta musrenbang merupakan asosiasi dari kelompok yang memiliki kelas sosial yang sama yakni wakil dukuh. Oleh karena itu, proses pertarungan di Musrenbang Desa berbeda dengan yang terjadi di dukuh. Proses pertarungan yang terjadi musrenbang dukuh lebih bersifat deliberatif. Artinya, proses pertarungan yang terjadi adalah pertarungan gagasan untuk membentuk sebuah konsensus. Konsensus tersebut dimanifestasikan dalam bentuk RPJM dan RKP Desa.

d. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi

di Desa Caturtunggal sesuai dengan teori medan dan teori tindakan komunikatif. Kedua teori tersebut tidak digunakan secara terpisah namun menjadi satu kesatuan dalam membedah fenomena Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Caturtunggal. Proses pelaksanaan musrenbang di Desa Caturtunggal tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Disisi lain, musrenbang ternyata juga menjadi arena kontestasi politik bagi masyarakat dalam artian memberikan pengaruh yang berdampak publik.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penyusunannya, Skripsi mengenai "Partisipasi Masyrakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman" akan disusun dalam 5 (lima) BAB yang terdiri dari ;

BAB I : berisi Pendahuluan yang membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II : berisi Gambaran umum penelitian yang membahas mengenai profil Desa Caturtunggal, profil pemerintahan desa Catirtunggal, kondisi demografi, sosial, ekonomi dan politik

BAB III : berisi Pembahasan yang membahas mengenai pelaksanaan serta partisipasi masyarakat dalam Musrenbang

BAB IV : berisi Analisis Teoritis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

BAB V : berisi Penutup berupa rangkuman, kesimpulan, saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. RANGKUMAN

Musrenbang merupakan forum yang diadakan oleh LPMD dibantu dengan Pemerintah Desa untuk membuat rumusan kebijakan berupa RPJM dan RKP desa. Musrenbnag dilaksanakan dengan melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Musrenbang Desa di Desa Caturtunggal dimulai dari tingkat bawah yakni musren RT/RW, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang dukuh di tingkat pedukuhan baru kemudian diadakan Musrenbang Desa. Di Desa Caturtunggal, musrenbang sudah dilaksanakan sejak medio tahun 2000-an.

Musyawarah perencanaan di masing-masing tingkatan dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Musren RT/RW dihadiri oleh masyarakat RT/RW, musrenbang dukuh dihadiri oleh tokoh masyarakat di pedukuhan dan pengurus RT/RW, sementara di tingkat desa Musrenbang Desa diikuti oleh tokoh masyarakat dan perwakilah pedukuhan. Jika Musrenbang Desa menyepakati RPJM dan RKP Desa, musrenbang di tingkat bawahnya hanya menyepakati prioritas program yang akan dibawa ke Musrenbang Desa.

Posisi partisipasi masyrakat dalam Musrenbang Desa diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat di pedukuhan. Meskipun demikian masyarakat masih dapat berpartisipasi untuk pembangunan desa melalui Musren

RT/RW atau melalui jalur informal seperti rapat RT/RW untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, masyarakat juga masih dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Caturtunggal. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebjiakan masih dapat terakomodir dalam batasan tertentu.

Dalam melihat fenomena musrenbang, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang terhubung yakni teori medan dan teori tindakan komunikatif. Teori medan menggambarkan bagaimana musrenbang dapat dilihat sebagai fenomena pertarungan antara aktor yang memiliki kepentingan dengan aktor yang memiliki penguasaan sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud dalam konteks ini dapat diartikan dalam berbagai spektrum, baik itu ekonomi, politik, selera seni termasuk intelektualitas. Pertarungan antar aktor tersebut nantinya akan menentukan siapa yang berhak berbicara dan menyampaikan gagasan di Musrenbang Desa.

Sementara itu, ketika aktor-aktor yang sudah ada sebelumnya sudah tereliminasi maka yang pertarungan yang ada akan bergeser. Jika sebelumnya yang bertarung adalah antar aktor yang memiliki kepentingan dan penguasaan sumberdaya, maka setelah tereliminasi pertarungan aktor menjadi pertarungan gagasan. Gagasan yang pada akhirnya dapat diterima sebagai kesepakatan bersama (konsensus) disebut sebagai tindakan komunikatif. Sebelum itu gagasan tersebut harus dapat melalui 3 fase

yaitu fase kebenaran, ketepatan dan kejujuran. 3 fase tersebut harus disepakati secara serempak agar gagasan yang disampaikan dapat menjadi klaim kesahihan.

B. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Musrenbang Desa bukalah hal yang baru bagi masyarakat Desa Caturtunggal. Pelaksanaan Musrenbang Desa sudah dimulai sejak tahun 2000-an, seiring dengan adanya program P2KP/PNPM. Setiap tahunnya, pelaksanaan musrenbang selalu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Kedua, akibat dari berbagai faktor seperti faktor geografis dan teritoris yang terdiri dari 20 pedukuhan dan ratusan RT/RW, Musrenbang Desa Caturtunggal dibagi kedalam beberapa fase. Fase tersebut dimlai dari tingkatan yang paling bawah yakni tingkat RT/RW, kemudian dilanjutkan di tingkat pedukuhan dan bermuara di desa. Fase pertama dan kedua dilakukan guna menjaring aspirasi masyarakat tingkat bawah yang kemudian disusun dalam prioritas program sebelum diajukan ke Musrenbang Desa. Sementara fase terakhir merupakan fase final dalam mengakomodasi aspirasi yang diperoleh dari akar rumput. Prioritas program yang telah terkumpul akhirnya dipilih dan dipilah untuk disahkan sebagai kebijakan desa dalam bentuk RPJM dan RKP Desa.

Ketiga, berdasarkan hasil analisa, Musrenbang Desa secara sosiologis dapat diartikan sebagai arena pertarungan sekaligus wahana untuk mengkomunikasikan gagasan masyarakat. Musrenbang menjadi arena pertarungan karena memiliki dimensi yang menghadapkan antara aktor yang memiliki kepentingan dengan aktor yang menguasai sumberdaya. Musrenbang menjadi arena yang menentukan atas pertarungan antar aktor didalamnya. Konkritnya, proses musrenbang akan menentukan siapa yang akan maju untuk mewakili aspirasi masyarakat secara umum. Selanjutnya, ketika aktor-aktor sudah tereliminasi melalui arena musrenbang maka yang akan hasil dari musrenbang itu sendiri ditentukan oleh tindakan komunikatif. Jika sebelumnya yang dipertarungkan adalah antar aktor, maka jika aktor-aktor yang ada telah dieliminasi maka yang dapat dipertarungkan adalah gagasan. Peserta musrenbang akan menentukan gagasan mana yang dapat diterima oleh publik dan mana yang tidak dapat teruji oleh publik. Gagasan yang dapat diterima oleh publik adalah gagasan yang mampu melewati 3 kriteria yaitu benar (objektif), tepat (normatif), jujur (subjektif). Dalam sudut pandang pembangunan desa, gagasan yang diusulkan haruslah gagasan yang berasal dari kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat. gagasan yang hanya berasal dari keinginan akan dieliminasi oleh forum. Gagasan yang telah teruji inilah yang nantinya akan disahkan sebagai kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk RPJM dan RKP Desa.

C. SARAN

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sadar bahwa masih banyak hal yang belum maksimal untuk dikaji dari fenomena musrenbang di Desa Caturtunggal. Oleh karenanya penelitian ini masih terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan. Berdasarkan pengalaman dilapangan dan informasi yang diperoleh kiranya penulis dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Walaupun Musrenbang sudah ada sejak tahun 2004 yang ditandai dengan adanya UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ternyata masih banyak masyarakat yang awam mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Oleh karena, perlu adanya pengembangan penelitian tentang Musrenbang apalagi di tingkat desa secara lebih komprehensif dan mendalam.

2. Masalah klasik ketika penelitian berhadapan dengan birokrasi pemerintah adalah akses data yang terbatas. Sikap tertutup birokrasi pemerintah terhadap kegiatan riset, terutama di desa ternyata sudah menjadi hal yang umum. Oleh karenanya, penelitian ini sangat terbuka untuk dikembangkan dengan data-data yang lebih komprehensif dan mendalam.

3. Untuk mengkases data di lapangan yang berkaitan dengan birokrasi, sekiranya peneliti selanjutnya perlu memahami

bagaimana tipikal dan model birokrasi yang sedang berjalan di instansi tersebut. Desa Caturtunggal memiliki model dan alur birokrasi yang unik dibandingkan dengan birokrasi di desa pada umumnya. Oleh karenanya, untuk mengkases data secara tepat peneliti harus memahami model birokrasi yang sedang berlangsung.

4. Desa Caturtunggal merupakan desa yang pesat laju perkembangannya. Dengan kompleksitasnya, sekiranya perlu diadakan penelitian-penelitian dengan tema yang lebih spesifik terhadap isu-isu tertentu yang berkembang di masyarakat.

5. Dalam perjalanan penelitian ini dan didukung oleh informasi yang diberikan oleh informan, dinamika yang terjadi di Desa Caturtunggal tidak hanya diakibatkan oleh kondisi yang terjadi saat ini. Dalam banyak hal, dinamika Desa Caturtunggal juga dipengaruhi oleh latar belakang historis penggabungan desa-desa yang dulu menjadi penopang terbentuknya Desa Caturtunggal.

6. Sejatinya musrenbang merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat. oleh karenanya penelitian tentang musrenbang sebetulnya masih dapat dikaji lebih lanjut dengan melakukan komparasi kebijakan yang dilakukan di negara lain seperti penganggaran partisipatif di Brazil. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi

masyarakat masih terbatas dalam ranah pengajuan program dan pelaksanaan dari program yang diajukan. Sementara dalam hal penganggaran masyarakat tidak mendapat ruang untuk ikut serta mengelola anggaran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Azhar, Fikri. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.* Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga Volume 3 Nomor 2.

Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. tidak ada kota terbit: Asia Foundation.

Gunawan, Daddi H., dkk. 2003. *Jalan Baru Otonomi Desa.* Jakarta : Kemitraan.

Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Jailani, M. Syahran. 2013. "*Ragam Penelitian Qualitative*" dalam Jurnal Edu-Bio vol. 4. Jambi: Institute Agama Islam Negeri Sulthan Thaha.

Karianga, Hendra. 2001. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Alumni.

Mumtaz, Ahmad. 1993. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam.* Bandung: Mizan.

Program Studi Sosiologi. *Pedoman Penulisan Proposal/Skripsi Sosiologi*.

Rozaki, Abdur,dkk. 2011. *Mempertemukan Dua Hulu*. Yogyakarta: IRE.

Sisk, Timothy D. 2002. *Demokrasi Di Tingkat Lokal.* Jakarta: AMEEPRO.

Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif.* Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.

Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan administrasi desa dan kelurahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suwandi dan Rostyaningsih, Dewi. tahun tidak ditemukan. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Tim Penulis. 2015. *Menggagas Tata Kelola Berbasis Keterbukaan.* Kemitraan.

Waters, Malcom. 1998. *Modern Sociological Theory*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publikation.

Wengert, Norman. 1976. *Citizen Participation: Pratice in Search of a Theory*. Natural Resources Journal Vol. 16. University of New Mexico.

Skripsi dan Thesis

Ekawati, Sri, *Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Deskripsi Kualitatif Tentang Partisipasi Di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret: Skripsi tidak diterbitkan, 2010)

Motte, Joseph, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*, (Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang: thesis tidak diterbitkan, 2005)

Dokumen:

Al-Qur'an Surat Asy Syura

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Caturtunggal 2015, dite rbitkan oleh Desa Caturtungal tahun 2014

Undang –Undang Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Wawancara dengan Kepala Bagian Pembangunan Pemerintah Desa Caturtunggal

Wawancara dengan Kepala Dukuh Ambarukmo

Wawancara dengan Kepala Dukuh Janti

Wawancara dengan Kepala Dukuh Karangmalang

Wawancara dengan Kepala Dukuh Nologaten

Wawancara dengan Kepala Dukuh Seturan

Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Caturtunggal

Wawanara dengan Ketua RT 04 Dukuh Ambarukmo

Internet

http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/04/20/tandai-tonggak-lahirnya-desa-Caturtunggal/

http://Caturtunggal.com/?pg=articles&article=16335